

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah baik skripsi, tesis, atau jurnal. Dalam hal ini peneliti mendapatkan penelitian serupa dengan peneliti yang dilakukan saat ini yang berpengaruh di antaranya yaitu:

1. Raudah, Ni Made Musiyani Anjasmari dan Gusti Muhammad Hidayatullah tahun 2025 dengan judul “Efektifitas Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Balah Paikat Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program Usaha Ekonomi Produktif di Desa Balah Paikat Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan permasalahan mengenai penyalahgunaan dana bantuan oleh penerima bantuan, kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan usaha, keterbatasan kouta penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Efektivitas Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Balah Paikat dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan teori dari Cambel J. P (dalam Dedi Amizah, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati 2018:41) yang terdiri dari 5 indikator, yaitu: 1) Keberhasilan Progran, 2) Keberhasilan Sasaran, 3) Kepuasan Terhadap Program, 4) Tingkat Input dan Output, 5) Pencapaian Tujuan menyeluruh. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan teknik snowball, sampling dan analisis data dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Balah Paikat Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang efektif.

Dilihat dari indikator Keberhasilan program dalam meningkat dan berkembangnya usaha masyarakat, keberhasilan sasaran dalam pencapaian tujuan dan tepat sasaran, kepuasan terhadap program sesuai harapan, Tingkat input dan output dan Pencapaian tujuan menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Widya Mawardani tahun 2025 dengan judul “Efektivitas Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Selat (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Kapuas)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan terutama di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Program UEP di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Peneliti menggunakan teori dari Sutrisno (2010) yang terdiri dari 5 indikator, yaitu: 1) Pemahaman Program, 2) Tepat Sasaran, 3) Tepat Waktu, 4) Tercapainya Tujuan, 5) Perubahan Nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan teknik snowball, sampling, dan analisis data dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata yang dialami KPM.
3. Windy Elin Nabila, Saidah Hasbiyah dan Gusti Muhammad Hidayatullah tahun 2025 dengan judul “Efektifitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga di Desa Purai Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya usaha , khususnya usaha sembako, tidak dapat berjalan dengan baik dan bahkan mengalami kegagalan, banyaknya terdapat kendala dalam menjalankan usaha

seperti kenaikan harga bahan baku, bencana alam, persaingan semakin ketat bagi penerima bantuan usaha cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan, serta masyarakat yang menjalankan usaha kolam ikan di Desa Purai mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena terbatasnya modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga miskin di Desa Purai Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Peneliti menggunakan teori dari Cambel J. P (Andi Agiskawati 2018:2) yang terdiri dari 5 indikator, yaitu: 1) Keberhasilan Progran, 2) Keberhasilan Sasaran, 3) Kepuasan Terhadap Program, 4) Tingkat Input dan Output, 5) Pencapaian Tujuan menyeluruh. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan mengikuti teori Analisis menurut Miles dan Huberman (dalam Hardani, dkk, 2020:163-172) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (*data reduction*) penyajian data (*data display*) penarikan simpulan dan verifikasi (*Conclusions drawing/verifying*).. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Desa Purai Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dinilai kurang efektif. Dilihat dari indikator Keberhasilan program dalam penyalurannya, Keberhasilan sasaran dalam penyaluran bantuan belum merata, Kepuasan terhadap program belum sesuai harapan, Tingkat input dan output dan Pencapaian tujuan menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Perbedaannya dengan penelitian sekarang terdapat pada jenis penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif di mana kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif, jumlah responden yang menyesuaikan jumlah penerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) di

Kecamatan Juai pada tahun 2025, lokasi penelitian yang tentu berbeda yaitu menggunakan Kecamatan Juai sebagai lokasi penelitian sekarang, objek penelitian hingga kriteria penilaian, jika pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pendapatan usaha maka pada penelitian sekarang menggunakan keberlanjutan usaha yang menjadi kriteria penilaiannya

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Efektivitas

2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas secara umum adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian tentang efektivitas, di antaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Cambel J. P (1989), efektivitas pada dasarnya adalah pengukuran sejauh mana suatu organisasi atau program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Campbell memandang bahwa efektivitas tidak bisa diukur dari satu sisi saja, melainkan harus dilihat dari proses dan hasil secara menyeluruh.
2. Menurut Richard M. Steers (1985), efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi atau program mencapai tujuan yang layak dan sejalan dengan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan tempatnya beroperasi.
3. Menurut Sondang P. Siagian (2001:24), efektivitas adalah

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, makin tinggi efektivitasnya.

Dari beberapa pengertian di atas dalam literatur manajemen kinerja, Steers memfokuskan efektivitas pada kemampuan adaptasi organisasi berskala besar, sementara Siagian lebih menekankan pada efisiensi penggunaan waktu dan rasio input-output teknis operasional.

Teori Campbell adalah yang paling komprehensif dan secara spesifik sangat arsitektural untuk mengukur kinerja program kebijakan publik/bantuan sosial. Campbell tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi mengevaluasi proses hulu ke hilir mulai dari input/sumber daya, ketepatan sasaran, kepuasan masyarakat yang dilayani, hingga keberhasilan program secara utuh.

2.2.1.2 Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program bukanlah perkara mudah, mengingat konsep ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang bergantung pada interpretasi penilainya. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan sasaran yang ditetapkan dengan hasil nyata yang dicapai. Sebaliknya, apabila proses atau hasil yang diperoleh tidak tepat sasaran, maka tujuan yang diharapkan tidak akan terpenuhi, sehingga proses tersebut dapat dikategorikan tidak efektif.

Menurut Subagyo dalam (Budiani, 2009) bahwa indikator efektivitas program terdiri dari:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program

4. Pemantauan program

Menurut Sutrisno (2010) dalam artikel jurnal (Fauziah et al., 2022) bahwa indikator efektivitas program terdiri dari:

1. Pemahaman Program
2. Ketepatan Sasaran
3. Ketepatan Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

Menurut Cambel J. P (dalam Dedi Amizah, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati 2018:41) indikator efektivitas program terdiri dari:

1. Keberhasilan program, merupakan indikator yang menilai apakah suatu program telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Indikator ini berfokus pada proses pelaksanaan program, termasuk kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan.
2. Keberhasilan sasaran, berkaitan dengan ketepatan program dalam menjangkau kelompok yang menjadi target utama. Indikator ini menilai apakah program telah diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
3. Kepuasan terhadap program, merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap program yang dijalankan. Kepuasan ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas program, baik dari segi pelayanan, manfaat, maupun dampak yang dirasakan.
4. Tingkat Input dan Output, indikator ini menilai perbandingan antara sumber daya (input) yang digunakan dengan hasil (output) yang dihasilkan. Input dapat berupa dana, tenaga kerja, waktu, dan fasilitas, sedangkan output merupakan hasil langsung dari program, seperti jumlah usaha yang terbentuk atau berkembang.

5. Pencapaian tujuan secara menyeluruh, merupakan indikator yang menilai sejauh mana program mampu mencapai tujuan utamanya secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Indikator ini mencakup dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari program.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator efektivitas program dari Cambel J. P (dalam Dedi Amizah, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati 2018:41).

2.2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Tingkat efektivitas suatu program tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal:

1. Sumber Daya Keuangan, yaitu kecukupan nominal bantuan dalam merespon harga pasar saat ini.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari sisi penyelenggara (petugas pelaksana dan pendamping dari dinas terkait) maupun kapasitas manajerial pelaku usaha (KPM) dalam mengelola dana bantuan.
3. Kondisi Lingkungan dan Ekonomi, yaitu faktor eksternal seperti tingkat inflasi, kenaikan harga bahan baku, dan tingkat persaingan di pasar lokal yang secara langsung menekan jalannya program.

2.2.2 Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

2.2.2.1 Definisi Usaha Ekonomi Produktif

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. UEP umumnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau prasejahtera sebagai upaya pemberdayaan ekonomi.

Secara konseptual, UEP adalah bentuk intervensi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha. Menurut Kementerian Sosial

Republik Indonesia, UEP adalah kegiatan usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha, pelatihan, serta pendampingan agar mampu mandiri secara ekonomi.

Selain itu, menurut Suharto (2014), UEP merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui penguatan usaha kecil berbasis potensi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa UEP tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, seperti peningkatan keterampilan dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, UEP dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan usaha produktif secara mandiri dan berkelanjutan.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif. Tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, UEP juga bertujuan membangun kemandirian, keterampilan, dan keberlanjutan usaha, sehingga mampu menjadi solusi jangka panjang dalam penanggulangan kemiskinan.

Kriteria penerima manfaat UEP adalah :

1. Keluarga pra sejahtera yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan berada di dalam desil 1-5.
2. Berusia antara 18 – 60 tahun dan/ atau sudah berkeluarga.
3. Memiliki embrio usaha.
4. Memiliki kemauan, potensi, dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.

2.2.2.2 Tujuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Berdasarkan pedoman umum pemberdayaan sosial, program UEP memiliki beberapa tujuan utama:

1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, UEP bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera, dalam memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil melalui kegiatan usaha produktif.
2. Mengurangi Tingkat Kemiskinan, melalui pemberian modal dan pembinaan usaha, UEP diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi, UEP dirancang agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu mengelola usaha sendiri dan mandiri secara ekonomi.
4. Mengembangkan Keterampilan dan Kapasitas Usaha, selain bantuan modal, UEP juga sering disertai pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis pelaku usaha.
5. Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil, UEP mendorong pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sehingga mampu bersaing di pasar.
6. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal dengan berkembangnya usaha kecil di masyarakat, UEP turut berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

2.2.2.3 Mekanisme Penyaluran

Mekanisme penyaluran bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur agar bantuan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan nomor 73 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif;

1. Proses penyaluran diawali dengan pengajuan proposal oleh calon penerima manfaat. Proposal tersebut disusun oleh individu atau kelompok usaha dan harus diketahui oleh Kepala

Desa atau Lurah serta Camat, kemudian diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial.

2. Proposal yang diajukan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Rencana Anggaran Belanja (RAB), fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, serta surat keterangan sebagai keluarga prasejahtera.
3. Setelah proposal diajukan, tahap selanjutnya adalah proses verifikasi. Dinas Sosial melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membentuk tim verifikasi yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan. Tim ini melakukan uji petik langsung ke lokasi guna menilai kelayakan calon penerima bantuan. Hasil verifikasi kemudian disusun dalam bentuk laporan yang menjadi dasar penetapan penerima manfaat melalui Surat Keputusan Bupati.
4. Setelah penetapan penerima, bantuan UEP disalurkan dalam bentuk stimulan berupa uang yang kemudian wajib dibelanjakan alat dan/atau bahan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Penerima bantuan diwajibkan menandatangani berita acara serah terima sebagai bukti resmi penyaluran bantuan. Bantuan yang diberikan harus digunakan secara optimal untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang dijalankan.
5. Selain penyaluran bantuan, mekanisme UEP juga mencakup tahap pendampingan. Setiap penerima manfaat akan didampingi oleh tenaga pendamping sosial yang ditunjuk oleh Dinas Sosial. Pendamping memiliki peran penting sebagai fasilitator, edukator, serta penghubung antara penerima manfaat dengan berbagai pihak terkait. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memberikan motivasi, serta memastikan keberlanjutan usaha yang dijalankan.

6. Tahap akhir dalam mekanisme penyaluran UEP adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan program, serta untuk menilai perkembangan usaha penerima manfaat. Monitoring dan evaluasi juga menjadi dasar dalam perbaikan program di masa yang akan datang agar lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, mekanisme penyaluran UEP meliputi tahapan pengajuan proposal, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut dirancang secara terintegrasi untuk menjamin bahwa bantuan dapat memberikan dampak nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera.

2.2.3 Keberlanjutan Usaha

2.2.3.1 Pengertian Keberlanjutan Usaha

Istilah “berkelanjutan” mengacu pada suatu proses atau tindakan yang terjadi secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga memungkinkan sesuatu berlangsung selama jangka waktu tertentu. Dalam konteks bisnis, konsep “keberlanjutan” melibatkan upaya menjaga konsistensi dalam tindakan dan proses perusahaan dari waktu ke waktu.

Menurut Butar (2021), keberlanjutan usaha tidak hanya bermakna bisnis mampu bertahan hidup (*survive*), melainkan harus menunjukkan kapasitas untuk terus tumbuh dan berkembang. Keberlanjutan ini diukur secara pragmatis melalui kinerja finansial dan operasional. Butar membaginya ke dalam tiga indikator utama yaitu perkembangan laba, pertumbuhan penjualan dan ekspansi usaha.

Menurut Suryana (2014), keberlanjutan usaha sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan bisnis yang dapat diukur secara kuantitatif melalui empat hal yaitu peningkatan akumulasi modal,

peningkatan volume penjualan, peningkatan volume produksi, dan penambahan jumlah tenaga kerja.

Saiman (2014) mengemukakan dalam konteks usaha mikro dan kecil (UKM), keberlanjutan usaha adalah kemampuan perusahaan untuk menjaga kontinuitas operasionalnya yang didukung oleh stabilitas posisi keuangan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. John Elkington (Konsep *Triple Bottom Line* - 1997), mengemukakan bahwa keberlanjutan bisnis yang sejati harus mencakup tiga pilar dasar yaitu *Profit* (keuntungan finansial), *People* (dampak sosial bagi masyarakat), dan *Planet* (kelestarian lingkungan).

Dalam konteks mengevaluasi efektivitas program intervensi sosial seperti bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi masyarakat prasejahtera di Kecamatan Juai menggunakan teori Butar memiliki landasan argumentasi yang sangat kuat, Teori Butar berfokus pada tiga hal yang sangat esensial dan mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro (penerima bantuan) apakah ada untung, apakah jualan makin laris, dan apakah jangkauan pembeli makin luas.

Relevan dengan tujuan bantuan modal di mana bantuan UEP pada dasarnya adalah injeksi modal awal. Mengukur “Perkembangan Laba” dan “Pertumbuhan Penjualan” menurut Butar adalah cara paling langsung untuk membuktikan apakah dana bantuan tersebut benar-benar berputar menjadi aset produktif, atau justru mandek dan habis untuk konsumsi harian.

Selanjutnya untuk mendeteksi kemandirian ekonomi indikator “Ekspansi Usaha” dari Butar sangat krusial untuk mengukur *graduasi* (kelulusan) masyarakat prasejahtera. Jika usaha mereka sudah mampu berekspansi (misalnya menambah lapak atau merambah desa sebelah), itu membuktikan bahwa intervensi pemerintah berhasil menciptakan kemandirian jangka panjang.

2.2.3.2 Indikator Keberlanjutan Usaha

Indikator keberlanjutan usaha menurut Butar (2021) adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan keuntungan secara efisien. Dalam konteks penerima bantuan, tingkat laba yang dihasilkan merupakan wujud efektivitas masyarakat pra sejahtera dalam mengelola bantuan UEP yang dipercayakan kepadanya. Laba yang stabil atau meningkat mengindikasikan bahwa bantuan tersebut berhasil dikelola menjadi sumber pendapatan yang produktif dan tidak sekadar habis untuk kebutuhan konsumtif.
2. Pertumbuhan usaha mencerminkan keberhasilan pemanfaatan modal atau sarana prasarana dari program UEP pada periode sebelumnya. Kenaikan volume penjualan barang atau jasa dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan dapat berputar dengan baik dan diterima oleh pasar lokal, yang pada gilirannya akan menjamin ketersediaan pendapatan yang berkelanjutan di masa depan.
3. Kemampuan menghadapi persaingan merupakan upaya penerima bantuan untuk mengembangkan kapasitas usahanya agar lebih maju dari kondisi sebelum menerima program. Hal ini dapat diukur tidak hanya dari perluasan jangkauan pasar atau pelanggan baru di lingkungan sekitarnya, tetapi juga melalui penambahan variasi produk, peningkatan jumlah alat kerja, atau peningkatan kapasitas produksi harian.

2.2.3.3 Manfaat Keberlanjutan Usaha

Membahas manfaat keberlanjutan usaha, terutama jika diaplikasikan pada skala usaha mikro dan program pemberdayaan masyarakat prasejahtera. Bila diselaraskan dengan indikator Butar (laba, penjualan, dan ekspansi) serta konteks pemberian bantuan modal seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP), manfaat

keberlanjutan usaha dapat diuraikan secara tajam ke dalam dua sudut pandang:

1. Manfaat bagi Pelaku Usaha (Penerima Bantuan)
 - a. Tercapainya Kemandirian Finansial yaitu keberlanjutan yang ditandai dengan perkembangan laba secara konsisten memastikan pelaku usaha memiliki sumber pendapatan yang stabil. Hal ini memutus mata rantai kemiskinan dan melepaskan ketergantungan mereka dari skema bantuan sosial lanjutan.
 - b. Peningkatan Skala Bisnis (Graduasi) yaitu melalui pertumbuhan penjualan dan ekspansi usaha, bisnis tidak akan berjalan stagnan. Usaha mikro berkesempatan untuk “naik kelas”, misalnya dengan menambah variasi produk jualan atau memperluas jangkauan pasar ke desa-desa dan kecamatan tetangga.
 - c. Resiliensi (Ketahanan) Usaha yaitu bisnis yang berkelanjutan memiliki tata kelola keuangan dan operasional yang lebih matang. Hal ini membuat pelaku usaha lebih tangguh dan siap menghadapi guncangan ekonomi, inflasi, atau penurunan daya beli.
2. Manfaat bagi Pihak Evaluator/Pemerintah
 - a. Bukti Efektivitas Intervensi Sosial yaitu tercapainya keberlanjutan usaha di tingkat masyarakat prasejahtera adalah indikator mutlak bahwa program bantuan (seperti UEP) berjalan sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa modal yang disalurkan benar-benar berfungsi sebagai aset produktif jangka panjang, bukan sekadar dana yang habis untuk konsumsi harian.
 - b. Penciptaan Efek Ganda (*Multiplier Effect*) Lokal yaitu ketika unit-unit usaha mikro di suatu daerah mampu bertahan dan berekspansi, perputaran ekonomi lokal akan meningkat. Usaha yang membesar pada akhirnya

berpotensi menyerap tenaga kerja tambahan dari lingkungan sekitar, sehingga manfaatnya meluas.

2.2.3.4 Hubungan Bantuan UEP dengan Keberlanjutan Usaha

Dalam program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), keberlanjutan usaha merupakan *output* jangka panjang yang diharapkan. Bantuan UEP berfungsi sebagai stimulus atau pemicu awal (*trigger*). Namun, efektivitas dari bantuan tersebut baru dapat dibuktikan apabila penerima manfaat mampu mengelola stimulus tersebut hingga memenuhi indikator-indikator keberlanjutan di atas. Kegagalan dalam mempertahankan produksi atau menghabiskan modal pokok untuk kebutuhan konsumtif semata akan menyebabkan usaha terhenti, yang berarti tujuan pengentasan kondisi prasejahtera belum tercapai secara efektif.

2.2.4 Masyarakat Prasejahtera

2.2.4.1 Definisi Masyarakat Prasejahtera

Secara konseptual dan administratif di Indonesia, pengertian masyarakat prasejahtera paling sering merujuk pada definisi dan indikator yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Masyarakat prasejahtera merupakan kategori sosial yang merujuk pada individu atau kelompok keluarga yang belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal secara layak. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Keluarga Prasejahtera didefinisikan sebagai keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator kebutuhan dasar (*basic needs*). Indikator tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pangan (makan dua kali sehari), sandang (memiliki pakaian berbeda untuk aktivitas berbeda), papan (rumah layak huni), serta akses terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Meskipun sering disamakan, istilah “prasejahtera” sering dianggap sebagai penghalusan (*eufemisme*) dari kata “miskin” dalam bahasa birokrasi. Namun, dalam analisis kebijakan, prasejahtera

lebih menekankan pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum yang ditetapkan oleh negara.

Melengkapi pandangan administratif di atas, kajian kesejahteraan sosial memandang kondisi prasejahtera secara lebih multidimensional. Menurut Suharto (2014), kelompok masyarakat miskin atau rentan (yang secara konseptual ekuivalen dengan masyarakat prasejahtera) adalah mereka yang mengalami gangguan atau hambatan dalam keberfungsian sosialnya (*social functioning*).

Kondisi ini ditandai oleh ketidakberdayaan (*powerlessness*) individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan esensial, memecahkan masalah yang dihadapi, dan menjalankan peran sosialnya secara layak di masyarakat. Ketidakberdayaan ini umumnya berakar pada minimnya penguasaan aset atau modal, baik berupa modal manusia (*human capital*) seperti tingkat pendidikan dan keterampilan, maupun modal ekonomi (*economic capital*) seperti akses terhadap sarana produksi dan permodalan usaha.

Berdasarkan penggabungan dua perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat prasejahtera adalah kelompok yang berada dalam pusaran kerentanan akibat ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimal sekaligus terhambatnya keberfungsian sosial mereka. Mengingat akar permasalahannya terletak pada ketiadaan modal ekonomi dan ketidakberdayaan, penanganan kelompok ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan bantuan karikatif (*amal*).

Intervensi yang dibutuhkan harus mengarah pada upaya pemberdayaan (*empowerment*) guna menumbuhkan kapasitas ekonomi. Oleh karena itu, penyaluran program perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menjadi instrumen yang sangat relevan. Bantuan ini tidak hanya difungsikan sebagai jaring pengaman sosial untuk mengatasi defisit pemenuhan kebutuhan dasar (sebagaimana indikator BKKBN), tetapi lebih jauh bertujuan untuk memulihkan

keberfungsian sosial (Suharto, 2014). Dengan adanya stimulasi modal UEP, masyarakat prasejahtera diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan usaha, membangun kemandirian finansial, dan secara bertahap melepaskan diri dari status prasejahtera.

2.2.4.2 Kriteria Masyarakat Prasejahtera

Adapun kriteria masyarakat prasejahtera menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terbagi menjadi 14 kategori, yakni:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
12. Sumber penghasilan rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak

tamat SD/ tamat SD;

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:81) Hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang telah diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan kerangka konseptual maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

H_o : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap keberlanjutan usaha masyarakat prasejahtera di Kecamatan Juai. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raudah, Ni Made Musiyani Anjasmari dan Gusti Muhammad Hidayatullah tahun 2025 dengan judul Efektifitas Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Balah Paikat Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan belum berjalan secara efektif.

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap keberlanjutan usaha masyarakat prasejahtera di Kecamatan Juai. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya Mawardani tahun 2025 dengan judul Efektivitas Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Selat (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Kapuas) yang menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2.4 Kerangka Pemikiran

Kondisi prasejahtera merupakan suatu permasalahan sosial ekonomi yang membutuhkan intervensi strategis, bukan sekadar bantuan karikatif. Di

Kecamatan Juai, upaya pengentasan permasalahan ini diwujudkan melalui intervensi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Balangan melalui penyaluran bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Bantuan ini dirancang sebagai stimulus modal awal untuk menumbuhkan embrio usaha mikro di kalangan masyarakat rentan.

Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan program tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kemandirian ekonomi penerima manfaat. Alur pemikiran dalam penelitian ini bertumpu pada dua variabel utama:

1. Variabel Bebas (X): Efektivitas Bantuan UEP

Keberhasilan penyaluran dan pemanfaatan bantuan UEP diukur menggunakan teori efektivitas dari J.P. Campbell. Terdapat empat indikator utama yang dievaluasi, yaitu: keberhasilan program (kesesuaian juknis), keberhasilan sasaran (ketepatan penerima di Kecamatan Juai), kepuasan penerima manfaat terhadap pelayanan pendampingan, serta pencapaian tujuan menyeluruh (penggunaan dana secara produktif).

2. Variabel Terikat (Y): Keberlanjutan Usaha

Sebagai hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan dari stimulus UEP, keberlanjutan usaha diukur menggunakan indikator dari Butar (2021). Indikator ini mencakup tiga aspek esensial ketahanan usaha mikro, yakni: aspek finansial (perputaran modal dan laba), aspek operasional (jumlah produksi), dan aspek pasar (retensi pelanggan dan daya saing).

Jika pemberian bantuan UEP berjalan efektif tepat sasaran, utuh, dan dimanfaatkan murni untuk modal maka secara teoretis hal tersebut akan mendorong ketahanan finansial, operasional, dan pemasaran unit usaha milik masyarakat prasejahtera. Sebaliknya, jika terdapat faktor penghambat yang signifikan di lapangan, efektivitas akan menurun dan keberlanjutan usaha menjadi sulit tercapai. Hubungan kausalitas inilah yang diuji kebenarannya melalui analisis statistik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan memberikan gambar pada kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

